

RATIFIKASI TIONGKOK ATAS PERJANJIAN PARIS PADA KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM 2015

Anang Fathur Rochman

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Email : anangrochman@live.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada latar belakang Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris 2015. Perjanjian Paris merupakan rezim perubahan iklim global yang menghimpun komitmen 171 negara sebagai pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca domestik sesuai dengan komitmen dalam INDC (*Intended Nationally Determined Contribution*) yang diserahkan kepada sekretariat perjanjian. Melihat Industri dan Perekonomian Tiongkok yang semakin maju ditambah fakta bahwa kondisi lingkungan di Tiongkok yang kurang baik akibat polusi dan pencemaran lingkungan menjadikan keputusan ratifikasi Tiongkok dipertanyakan. Keputusan ini bukan kecenderungan baru dalam kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon perubahan iklim, namun yang menjadi unik adalah upaya Tiongkok dalam menyambut rezim perubahan iklim terlihat berbeda saat Perjanjian Paris sehingga penelitian ini berusaha menelusuri dan mengkaji faktor dominan yang menjadi latar belakang keputusan Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris. Selanjutnya, guna melihat latar belakang Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris peneliti menggunakan kerangka pemikiran *Climate Governance*, Perubahan Iklim dan kaitannya dengan Politik Luar Negeri suatu negara dan *Green Economy* yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari analisis data-data didapat bahwa alasan Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris karena dua faktor. Pertama, karena Tiongkok ingin menjadi Leader dalam rezim perubahan iklim global. Kedua, Tiongkok telah menuju kearah *Green Economy* sehingga proses dalam mitigasi perubahan iklim menjadi lebih mudah bagi Tiongkok dan perekonomian Tiongkok tetap dapat berkembang.

Kata Kunci : Tiongkok, Perjanjian Paris, Perubahan Iklim, *Green Economy*.

ABSTRACT

This study focuses on the background of China ratifying the 2015 Paris Agreement. The Paris Agreement is a global climate change regime that brings together 171 countries' commitment to reduce domestic greenhouse gas emissions in accordance with the commitments in the INDC (Intended Nationally Determined Contribution) submitted to the agreement secretariat. Seeing China's advanced industry and economy coupled with the fact that environmental conditions in China are not good due to pollution and environmental pollution make the decision to ratify China questionable. This decision is not a new trend in Chinese foreign policy in responding to climate change, but what is unique is China's efforts to welcome the climate change regime look different when it comes to Paris Agreement so this study seeks to explore and examine the dominant factors behind China's decision to ratify the Paris Agreement . Furthermore, in order to see China's background in ratifying the Paris Agreement researchers used the framework of Climate Governance, Climate Change and its relation to the foreign policy of a country and the Green Economy which was analyzed using qualitative methods. From the analysis of the data obtained, the reason China ratified the Paris Agreement was because of two factors. First, because China wants to be a leader in the global climate change regime. Secondly, China has headed towards the Green Economy so that the process of mitigating climate change becomes easier for China and the Chinese economy can still develop.

Keyword : Tiongkok, Perjanjian Paris, Perubahan Iklim, *Green Economy*.

Sebagian negara berkembang di Asia seperti Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di kawasannya. Tiongkok merupakan negara yang menggantungkan perekonomiannya dari sektor industri. Sehingga mayoritas penggunaan energi sekitar 70% dipergunakan untuk sektor industri. Dampak pengembangan industri di Tiongkok terhadap lingkungan antara lain; meningkatnya polusi udara, pencemaran air sungai akibat limbah industri, dan pembukaan lahan hutan yang masif merupakan beberapa contoh pembangunan ekonomi yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di Tiongkok. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan Xhou Shengxian (Kepala Badan Lingkungan negara Tiongkok) yang mengatakan bahwa kondisi lingkungan di Tiongkok sudah memasuki fase kritis yang mengancam kesehatan masyarakat serta kestabilan sosial. (BBC.co.uk)

Tiongkok termasuk kedalam negara dengan luas wilayah yang besar yaitu sekitar 9,5 juta km persegi. Selain itu Tiongkok juga negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu sekitar 1,338 miliar pada tahun 2010. Tiongkok juga menjadi negara yang tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia yaitu mencapai 10,7% pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, Tiongkok juga menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang dengan jumlah GDP sebesar \$4 triliun. Dari bukti bukti tersebut Tiongkok dapat dikatakan sebagai salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Akan tetapi fenomena tersebut diiringi dengan semakin banyaknya pencemaran lingkungan. Pada tahun 2010, Tiongkok merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia melampaui Amerika Serikat akibat semakin berkembangnya industri mereka (Wei, 2014).

Untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang terjadi, negara-negara di dunia mengadakan konferensi internasional dalam bidang perbaikan lingkungan dan perubahan iklim yang mana diharapkan dalam konferensi ini dapat memberikan jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim. Konferensi pertama mengenai hal ini diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas lingkungan hidup internasional dilaksanakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 yang kemudian dikenal dengan konferensi Stockholm (Erwin, 2009). Konferensi ini sebagai penentu langkah awal dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup secara global yang melahirkan kerjasama antarnegara dalam penyelamatan lingkungan hidup. Kerjasama tersebut menghasilkan pembentukan badan lingkungan yang kemudian disebut United Nations Environment Program (UNEP) yang berkedudukan di Nairobi, Kenya. Setelah itu terjadi

konferensi-konferensi lanjutan hingga pada tanggal 21 Maret 1992 diadakan konferensi Rio di Brazil yang membicarakan topik mengenai perubahan iklim, permasalahan polusi, penipisan lapisan ozon dan semakin meluasnya penggundulan hutan. (Erwin, 2009). Konferensi Rio menghasilkan suatu kesepakatan yang diterima secara universal sebagai komitmen politik internasional mengenai perubahan iklim, yaitu melahirkan *The United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (UN.org). Selanjutnya, Departemen Pertahanan UN (2010) menjelaskan bahwa UNFCCC bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) yang ada di atmosfer sehingga masuk kepada taraf yang tidak membahayakan kehidupan dan diharapkan dapat memperbaiki ekosistem guna menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Konferensi Paris adalah konferensi lanjutan yang termasuk ke dalam COP-21 atau *conference of party* ke 21 yang diadakan oleh UNFCCC sebagai langkah global dalam usaha menghadapi perubahan iklim. Konferensi ini dikatakan akan memenuhi capaian apabila 55 negara yang mewakili 55% emisi gas rumah kaca global tahunan meratifikasi Perjanjian Paris. Tujuan utama dari konferensi ini adalah menjaga suhu rata-rata bumi agar tidak naik hingga mencapai 2°C hingga tahun 2100. Ratifikasi Tiongkok atas Perjanjian Paris bukan merupakan kecenderungan baru, Tiongkok sebelumnya telah terlibat aktif dalam beberapa konferensi atau forum lingkungan dan perubahan iklim, namun terlihat bahwa Tiongkok sedang meningkatkan peranannya di dalam permasalahan iklim akhir-akhir ini terutama menjelang Perjanjian Paris.

Kebijakan Perubahan Iklim Tiongkok Pasca Protokol Kyoto Hingga Perjanjian Paris

Tiongkok, penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, memiliki reputasi kurang baik pada isu - isu lingkungan. Namun secara paradoks, Tiongkok telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan ke dalam kebijakan yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan-kebijakan ini utamanya didorong oleh pertimbangan domestik dalam permintaan energi, restrukturisasi ekonomi serta faktor lain seperti citra internasional. Tiongkok perlu menemukan jalur pertumbuhan yang lebih bersih akibat dari adanya kritik yang muncul dari publik.

Ada banyak aktor di Tiongkok yang berusaha mempengaruhi kebijakan perubahan iklim. Secara khusus, pemerintah provinsi dan para ahli mendapatkan dorongan lebih besar terhadap pembuatan kebijakan baru. Dengan semakin luasnya rentang aktor, ini membuka peluang baru bagi aktor lain

untuk terlibat dalam upaya mitigasi perubahan iklim Tiongkok. Pemerintah asing sebaiknya melakukan hubungan jangka panjang dengan para pelaku kebijakan yang tepat jika mereka ingin memiliki pengaruh terhadap jalur pertumbuhan hijau Tiongkok.

Kebijakan perubahan iklim Tiongkok pasca Protokol Kyoto berfokus kepada diplomasi iklim. Tiongkok mencoba merumuskan bagaimana caranya agar negara berkembang lebih dapat berkomitmen terhadap mitigasi perubahan iklim dibawah Mekanisme Kyoto, khususnya CDM (Harris dan Yu, 2005). Salah satu perkembangan terpenting dalam periode kebijakan perubahan iklim Tiongkok adalah perubahan sikapnya terhadap mekanisme yang lebih fleksibel. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Tiongkok pada awalnya kritis terhadap proposal Implementasi Bersama yang melibatkan negara-negara berkembang, termasuk *Clean Development Mechanism* (CDM) ketika diusulkan sebagai bagian dari Protokol Kyoto. Namun, pada COP-5 di Bonn pada tahun 1999, Tiongkok tidak mengajukan keberatannya pada mekanisme fleksibilitas ketika berdiskusi di dalam konferensi (Zhang, 2003). Hal ini menunjukkan Tiongkok mulai pro terhadap kebijakan perubahan iklim.

Setelah pertemuan ini, Tiongkok juga mulai mengambil bagian yang lebih aktif dalam diskusi tentang aturan dan prosedur yang memandu pelaksanaan praktis proyek CDM. Dalam pandangan Tiongkok, semua teknologi harus diizinkan di bawah CDM, termasuk proyek-proyek energi nuklir. Dengan meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2002, Tiongkok menjadi memenuhi syarat untuk proyek CDM. Posisi Tiongkok mengenai CDM berkembang dari skeptisisme awal menjadi fokus yang lebih pragmatis dalam memaksimalkan manfaat yang mungkin didapatkan dari partisipasi Tiongkok dalam proyek-proyek tersebut (Tangen dan Buen, 2001)

Tiongkok memiliki sikap positif terhadap perubahan iklim dan secara bertahap merumuskan dan menerapkan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Pemerintah Tiongkok merilis Program Perubahan Iklim Nasional Tiongkok (CNCCP) pada Juni 2007 dan Buku Putih “Kebijakan dan Tindakan Pemerintah untuk Mengatasi Perubahan Iklim” pada tahun 2008. Dalam dokumen-dokumen ini, Tiongkok menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip “Common But Different Responsibility” dari UNFCCC, Para Pihak yang termasuk dalam Annex I pada Konvensi harus mengambil langkah pertama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk negara-negara berkembang dengan emisi historis dan emisi per kapita rendah lebih sedikit, prioritasnya adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara

berkembang, Tiongkok akan tetap pada strategi pembangunan berkelanjutan dan mengambil langkah-langkah seperti peningkatan efisiensi energi, konservasi energi, pengembangan energi terbarukan, pelestarian dan konstruksi ekologi, serta penanaman pohon skala besar dan penghijauan, untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi lebih lanjut untuk melindungi sistem iklim global; Tiongkok siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim dan perumusan dokumen hukum yang relevan.

Tiongkok Dan Rezim Perubahan Iklim Internasional

Secara umum, posisi Tiongkok di masa-masa awal mereka di rezim-rezim lingkungan internasional cukup mengundang kontroversi. Di satu sisi, emisi yang dihasilkan Tiongkok cukup tinggi, sementara Tiongkok selalu terlibat aktif dalam perundingan perubahan iklim namun tidak menunjukkan itikad untuk serius menanggapi. Pergeseran kearah proaktif terhadap permasalahan iklim salah satunya akibat tekanan pada pemerintah Tiongkok dari dalam Tiongkok sendiri. Menurut laporan resmi pemerintah Tiongkok, pengaduan warga tentang lingkungan, yang diungkapkan pada hotline resmi dan surat-surat kepada pejabat lokal, pada 2006 meningkat 30% per tahun, dan diproyeksikan mencapai 450.000 aduan pada 2007 (Ash, et.al., 2012). Sejak mempresentasikan pernyataan bersama pertama mereka di Konvensi Protokol Kyoto di Bali pada bulan Desember 2007, LSM Lingkungan Tiongkok, bekerja sama dengan LSM internasional, telah mengasumsikan peran yang lebih menonjol dalam upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Tiongkok.

Kerusakan lingkungan di Tiongkok sudah menghabiskan biaya ekonominya sekitar 10% dari PDB-nya, dan cukup merugkan terlepas dari jutaan modal ventura yang diinvestasikan di Tiongkok oleh perusahaan-perusahaan asing untuk proyek-proyek mitigasi di bawah *Clean Development Mechanism* (CDM) (Huang, 2015). Para kritikus menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok lebih baik daripada AS dengan menjadi penandatangan Protokol Kyoto (AS tidak

menandatangani Protokol Kyoto), Tiongkok menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat bahwa negara berkembang tidak wajib untuk mengurangi emisinya (Huang, 2015).

Dari sini dapat dilihat bahwa pada awalnya, posisi Tiongkok di dalam Protokol Kyoto dapat dikatakan membingungkan, karena di satu sisi Tiongkok memerlukan Protokol Kyoto untuk standarisasi pengaturan dan pengelolaan lingkungan yang rusak akibat industrialisasi mereka, tetapi di saat yang sama masih banyak problem-problem nasional di Tiongkok yang terjadi yang berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim.

Pergeseran Tiongkok dalam ratifikasi rezim lingkungan internasional mulai terlihat di masa ratifikasi Perjanjian Paris. Dengan semakin fokusnya Tiongkok ke arah ekonomi yang berbasis lingkungan dan energi terbarukan, posisi Tiongkok dalam rezim-rezim tersebut semakin jelas. Pergeseran ini awalnya berkaitan dengan meningkatnya masalah polusi udara, yang mana ditanggapi oleh pemerintah Tiongkok dengan mengumumkan rencana lima tahun (Five Years Plan) ke-12, dengan dana sebesar 277 miliar dolar AS, khusus untuk mengatasi masalah ini pada 2013. (Huang, 2015)

Namun tren ini perlahan berbalik ketika menuju Perjanjian Paris. Pada 2010, Tiongkok memulai langkah-langkah progresif dalam pergeserannya menuju ke arah yang lebih hijau. Pada bulan Oktober 2010 Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan keputusan tentang Percepatan Pengembangan Industri Strategis dan *Emerging*, yang mencakup paket kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak dan keuangan, selain itu, Industri manufaktur tenaga surya Tiongkok yang pertama kali dirintis pada 1990-an bisa benar-benar lepas landas pada tahun 2000, mewakili setengah dari produksi fotovoltaik global (PV) pada tahun 2010. Hingga 2011, lebih dari 90 persen produksi Tiongkok diekspor. Dalam menyambut Perjanjian Paris, terlihat Tiongkok secara perlahan telah bergeser menuju ke arah perbaikan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Lebih jauh lagi, Tiongkok kemudian semakin mengembangkan *concern* mereka di aspek lingkungan ke tingkat internasional. Peran Tiongkok dalam solusi perubahan iklim internasional dianggap telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tiongkok telah menjadi fokus perhatian negara Internasional dalam aspek lingkungan karena perubahan yang dilakukan oleh Tiongkok yang signifikan tersebut. Ini tercermin dalam lingkaran kebijakan domestik Tiongkok juga, terutama melalui restrukturisasi kelembagaan yang ditujukan untuk koordinasi pemerintah yang lebih baik pada kegiatan kebijakan terkait iklim. Tiongkok merilis rencana perubahan iklim

nasional pertama tahun 2015, terdiri dari langkah-langkah yang diambil yang dapat membantu memperlambat pertumbuhan emisi gas rumah kaca Tiongkok.

Hal ini diperkuat dengan statemen Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ia menyebut Perjanjian Paris sebagai “hard-won achievement” bahwa “all signatories must stick to”. Dia berjanji bahwa Tiongkok akan memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan iklim PBB, meskipun keputusan AS untuk menarik diri tidak akan membuat komitmen Tiongkok menurun (Shankleman, 2017). Pada Kongres ke-19 Partai Komunis Tiongkok pada bulan Oktober 2017, Xi mengatakan bahwa Tiongkok berada di "driving seat" ketika berbicara dalam konteks "kerjasama internasional" tentang perubahan iklim (Huang dan Lahiri, 2017) .

Selain itu, itikad baik Tiongkok dalam pergeserannya menuju Climate Leader ditandai dengan langkah Tiongkok memperlakukan perubahan iklim sebagai masalah ilmiah dan memberi tanggung jawab kepada Administrasi Meteorologi Negara untuk menasehati pemerintah tentang opsi kebijakan dalam negosiasi internasional seputar Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Kesadaran dan kepekaan politik di sekitar perubahan iklim yang meningkat pada akhir 1990-an membuat peran ini bergeser ke Komisi Pembangunan dan Perencanaan Negara yang lebih kuat, yang sejak itu berkembang menjadi Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) (Jing, 2015). Langkah ini menunjukkan pergeseran dalam nilai relatif yang diberikan untuk masalah ini, serta mungkin pergeseran perspektif dari masalah ilmiah menjadi masalah pengembangan yang dominan.

NDRC juga berfungsi sebagai otoritas pengambilan keputusan kebijakan energi utama di Tiongkok, dan langkah ini mungkin telah mencerminkan kebutuhan yang jelas untuk prioritas iklim untuk dikoordinasikan lebih baik dengan keputusan energi. Sekarang menjadi rumah bagi Komite Koordinasi Nasional tentang Perubahan Iklim, yang mengawasi kegiatan iklim dalam NDRC, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sains dan Teknologi, dan Administrasi Perlindungan Lingkungan Negara (SEPA). Hari ini, NDRC dan Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk merumuskan posisi negosiasi internasional Tiongkok.

Sebagai catatan, hingga tahun 2015 Tiongkok memperluas pemanfaatan tenaga nuklir dan energi terbarukan nonhidroelektrik, sumber-sumber ini terdiri dari 2% dan 0,7% listrik Tiongkok (Myllyvirta, 2015). Generasi, masing-masing, sedangkan hidroelektrik menyumbang sekitar 16%, dan ini dilakukan dengan dibawahi oleh pemerintah Tiongkok langsung. Untuk sektor kelistrikan,

targetnya adalah 20% dari kapasitas dari energi terbarukan pada 2020, yang akan membutuhkan peningkatan substansial dalam penggunaan tenaga angin, tenaga biomassa, tenaga surya, dan tenaga air. Undang-undang ini menawarkan insentif keuangan, seperti dana nasional untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan diskon pinjaman dan preferensi pajak untuk proyek-proyek energi terbarukan. Meskipun peningkatan tenaga angin secara khusus telah mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, sumber energi ini masih dikedirikan oleh tenaga air skala besar. Kapasitas pembangkit listrik tenaga air diproyeksikan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2020, membutuhkan setara dengan bendungan baru yang menjadi bagian dari Three Gorges Project Tiongkok (Andresen dan Agrawala, 2002).

Kecepatan reaksi Tiongkok ini menunjukkan kesiapan Tiongkok untuk berkomitmen dan patuh terhadap Perjanjian Paris. Tindakan yang diambil terhadap perubahan iklim juga sesuai dengan prioritas domestik lainnya, seperti mengatasi polusi udara dan air, membatasi impor minyak dan mempromosikan industri baru seperti kendaraan listrik dan teknologi berbasis *clean energy*. Dan ini mungkin merupakan peluang unik bagi Tiongkok untuk memimpin di tingkat global, mengingat biaya tambahan yang lebih rendah, dan sedikit perlawanan dari negara-negara besar lainnya. Selama kepemimpinannya di G20 tahun lalu, Tiongkok telah menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk mengawal Perjanjian Paris tanpa AS, meningkatkan upaya kolektifnya pada keuangan hijau.

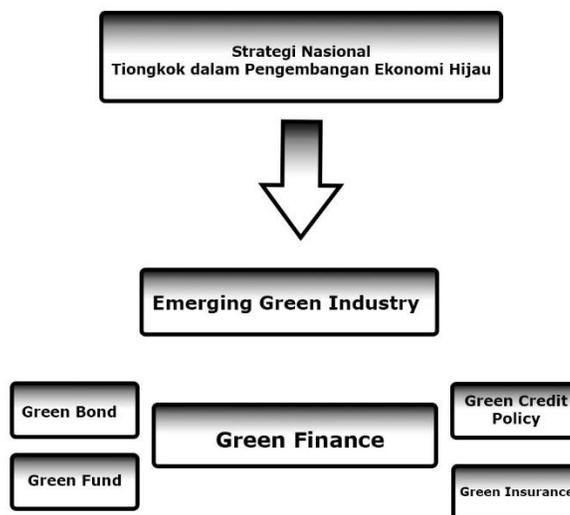
Tentu saja, Upaya Tiongkok memimpin juga tidak berarti negara lain akan menyerahkan semua ke Tiongkok untuk mengisi semua celah yang ditinggalkan oleh kepemimpinan AS, terutama ketika menyangkut pendanaan iklim dan teknologi bersih. Salah satu contohnya adalah komitmen AS sebesar \$3 miliar untuk negara-negara berkembang untuk mengatasi penyebab dan dampak perubahan iklim. (Otterstrom dan Stripple, 2012). Pada teknologi, Tiongkok berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan, tetapi saat ini beberapa perusahaan Tiongkok dianggap sebagai inovator kelas dunia. Terobosan cepat yang dibutuhkan kemungkinan besar akan datang melalui peningkatan kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara besar lainnya, tidak terkecuali Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. (Otterstrom dan Stripple, 2012).

Dari sini, dapat dilihat bahwa sebagai negara dengan tingkat pembangunan industri yang tinggi, perekonomian yang kuat, dan fokus kebijakan luar negeri di aspek lingkungan, terutama *green economy*, serta keaktifan di forum-forum lingkungan internasional, menunjukkan kesiapan dan

ambisi Tiongkok sebagai pemain utama di dalam aspek *green economy*, dan bahkan disebut sebagai *Green Leadership*. Tidak hanya komitmen semata, Tiongkok menunjukkan realisasi tersebut melalui kebijakan-kebijakan mereka yang pro energi terbarukan, dan bahkan siap mengurangi emisi dan menambah jumlah pasokan listrik dari energi terbarukan. Setidaknya ini menggambarkan bagaimana Tiongkok telah beberapa langkah di depan negara-negara lain dalam aspek kepemimpinan di dalam aspek lingkungan. Absennya AS di dalam forum-forum lingkungan internasional tentu juga semakin menguatkan posisi Tiongkok sebagai pemimpin.

Green Economy Sebagai Salah Satu Kekuatan Ekonomi Tiongkok

Salah satu latar belakang Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris adalah karena Tiongkok telah mulai mengimplementasikan ekonomi hijau ke dalam kebijakan ekonominya. Meskipun pengembangan ekonomi hijau masih memasuki tahap awal di Tiongkok dan mungkin masih banyak resiko dan tantangan kedepannya karena masalah-masalah seperti pola pertumbuhan yang lama, lambatnya restrukturisasi ekonomi dan industri, kondisi sosial yang tidak menguntungkan, inovasi teknologi yang tidak memadai, implementasi kebijakan yang buruk, dan pengelolaan lingkungan yang lemah. Dilihat dari fakta yang ada di Tiongkok, maka dapat dikatakan bahwa ini akan menjadi proses panjang bagi Tiongkok untuk bertransisi.



Gambar 1 Strategi Green Economy Tiongkok

Sumber : Berdasarkan data dalam buku *Green Economy and It's Implementation in China*. 2011

Dapat dilihat dari grafik sebelumnya bahwa Tiongkok sedang menuju ke arah *green economy* melalui dua jalan. Yaitu dengan meningkatkan *green industry* dan *green finance* (Xia dan Guomei, 2011). Tiongkok berada pada tahap industrialisasi dan urbanisasi yang cepat, yang mana berdampak pada kondisi lingkungan dan sumber daya. Untuk memecahkan problematika ini Tiongkok harus mempercepat perubahan pola pembangunan ekonomi yang juga disertai dengan perbaikan dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan melakukan ini, Tiongkok dapat menjalankan transisi ekonomi sedini mungkin dan memperkuat daya saing internasionalnya. Pada bulan Oktober 2010 Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan keputusan tentang Percepatan Pengembangan Industri Strategis dan *Emerging*, yang mencakup paket kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak dan keuangan. Di antara mereka ditentukan bahwa lingkungan, teknologi informasi baru, energi baru dan material baru, menjadi bidang yang diprioritaskan. Keputusan tersebut merupakan dorongan baru bagi pengembangan industri hijau yang baru muncul. Yang mana di dalam industri hijau terdapat sistem produksi hijau. (Xia dan Guomei, 2011).

Sistem produksi hijau adalah dasar bagi ekonomi hijau karena tidak hanya akan mengurangi konsumsi sumber daya dan pencemaran lingkungan, tetapi juga mendorong inovasi hijau dan mendorong perilaku konsumsi hijau. Produksi hijau harus mempertimbangkan biaya lingkungan dan sumber daya produk, tidak hanya dalam proses produksinya, tetapi juga di seluruh siklus hidupnya. Pendekatan ini akan membantu membangun rantai pasokan hijau dan sistem indikator untuk produksi hijau. (Xia dan Guomei, 2011).

Strategi Tiongkok yang kedua adalah melalui *green finance* atau keuangan hijau. Keuangan hijau mencakup kebijakan fiskal dan moneter dalam suatu negara yang berkaitan dalam mendukung pengembangan "energi terbarukan baru" dan "produk hijau" melalui kebijakan pengadaan dan perpajakan pemerintah yang menguntungkan, bahkan melalui subsidi. Sebagai contoh, di Jepang dan beberapa negara Eropa telah memberikan subsidi kepada industri tenaga surya domestik mereka. Pemerintah juga dapat memanfaatkan kondisi pinjaman yang menguntungkan, seperti suku bunga yang lebih rendah dan perpanjangan pinjaman yang lebih lama untuk mendukung proyek-proyek hijau dalam mitigasi perubahan iklim.

Industri adalah salah satu kekuatan ekonomi nasional Tiongkok, mulai dari Industri manufaktur hingga industri kreatif. Akan tetapi industri juga penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Tiongkok. Dalam merespon hal ini, Tiongkok mengimplementasikan konsep *green industry*

terhadap industri yang ada di Tiongkok. Yaitu melalui inovasi dalam teknologi hijau, transisi hijau, sistem produksi hijau, dan kebijakan ekonomi hijau (Kuriakose, et.al. 2017).

Inovasi Tiongkok dalam teknologi hijau diwujudkan dalam tiga sektor berbeda. Yaitu surya, angin, dan sektor penyimpanan energi. Inovasi hijau dapat menjadi pendorong pertumbuhan baru. Dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan (a) meningkatkan produktivitas dalam industri tradisional dengan mengurangi penggunaan energi dan mengurangi dampak lingkungan; (b) memperluas industri hijau baru, seperti energi terbarukan, mobil bersih, dan pengelolaan limbah; dan (c) melompati teknologi saat ini untuk melahirkan industri baru. Selain itu, inovasi hijau dapat berkontribusi pada pertumbuhan dengan memperbesar sektor jasa yang mendukung pembangunan hijau, seperti manajemen energi kontrak atau transportasi umum yang bersih. Pemerintah Tiongkok berharap bahwa inovasi hijau akan secara substansial meningkatkan pertumbuhan. (Kuriakose, et.al. 2017).

Green Finance di Tiongkok mencakup sistem keuangan yang mendukung dalam mewujudkan transisi ekonomi hijau Tiongkok. Tujuan *green finance* adalah untuk mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi lingkungan termasuk mendukung perbaikan lingkungan, mengatasi perubahan iklim dan penggunaan sumber daya yang efisien. Berkaitan dengan posisi kebijakan luar negeri Tiongkok ini, *green finance* sebagai kebijakan yang dicanangkan pemerintah Tiongkok merupakan wujud komitmen Tiongkok untuk menciptakan ekonomi yang berbasis dan ramah lingkungan. Menurut laporan UN Environment, Tiongkok merupakan negara dengan potensi paling tinggi sebagai pemimpin dalam hal *green finance*. Tiongkok membentuk Membentuk Sistem Keuangan Hijau Tiongkok dan menggandeng International Institute of Green Finance (IIGF) dan Central University of Finance and Economics (CUFE), serta UN Environment ke alam Desain Sistem Keuangan Berkelanjutan milik Tiongkok (UNEP. 2017). Dari kerjasama tersebut, kemudian menghasilkan empat kebijakan yang ditempuh Tiongkok untuk mewujudkan *green finance*. Yaitu melalui *green bond*, *green fund*, *green credit policy*, dan *green insurance*.

Kesimpulan

Tiongkok merupakan negara yang menjadi salah satu pemain utama di dalam isu lingkungan. Hal ini didasari oleh latar belakang Tiongkok yang menjadi negara produsen polusi terbesar di dunia. Di saat yang sama, Tiongkok yang menyadari hal itu kemudian juga terlibat aktif di dalam berbagai rezim internasional yang berfokus dalam isu lingkungan. Tiongkok telah terlibat aktif dalam proses

negosiasi dan kesepakatan internasional dalam upaya penyelamatan lingkungan sejak tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan Tiongkok dengan telah bergabungnya kepada lebih dari 50 perjanjian-perjanjian perlindungan lingkungan internasional, Seperti Protokol Montreal, Protokol Kyoto, Convention on Biological Diversity, dan UN Convention to Combat Desertification. Di dalam (UNFCCC) pertama tahun 1992 sendiri, Tiongkok merupakan negara pertama yang meratifikasi terbentuknya UNFCCC. Sementara itu, dalam Protokol Kyoto tahun 1997, Tiongkok juga merupakan salah satu negara yang menandatangani pada tahun 1998 dan kemudian meratifikasinya pada tahun 2002.

Dari penelitian ini, temuan penting yang peneliti dapatkan adalah bahwa Tiongkok mau meratifikasi Perjanjian Paris karena Tiongkok memiliki kepentingan nasional di aspek lingkungan. Penulis melihat bahwa ada dua kepentingan nasional Tiongkok yang utama, berkaitan dengan aspek lingkungan. Yang pertama berkaitan dengan kepemimpinan di rezim lingkungan internasional. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar dan memiliki pengaruh signifikan, Tiongkok melihat bahwa ada potensi yang besar untuk bisa menjadi pemain utama di dalamnya. Ini juga melihat fakta bahwa AS sebagai negara adidaya tidak terlibat di dalam rezim lingkungan internasional sama sekali. Adanya kevakuman inilah yang berusaha diisi oleh Tiongkok. Upaya ini terlihat dari bagaimana Tiongkok tidak hanya sekadar meratifikasi Perjanjian Paris, tetapi juga dalam pembangunan negaranya mulai memperhatikan aspek lingkungan dan energi terbarukan sejak satu dekade lalu. Keaktifan Tiongkok di dalam Perjanjian Paris ini juga menguatkan posisi mereka sebagai kekuatan yang dominan di dalam rezim tersebut.

Yang kedua berkaitan dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh aspek lingkungan tersebut, terutama energi terbarukan. Tiongkok dalam perkembangan ekonominya, mulai mengarah ke pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber perekonomian mereka. Tiongkok menjadi salah satu produsen alat-alat pembangkit listrik energi terbarukan, seperti turbin, panel surya, dan kincir angin, terbesar di dunia, bersaing dengan negara-negara Eropa seperti Jerman. Tidak hanya itu, Tiongkok juga telah meluaskan ekspor alat-alat pembangkit listrik tersebut ke pasar-pasar Afrika dan Asia. Selain itu, Tiongkok juga memberlakukan sistem green economy seperti *green finance* dan *green bond*, yang mana semuanya merupakan wujud dari bagaimana Tiongkok memfokuskan pembangunan ekonominya ke arah ekonomi hijau.

Jika dilihat dari sudut pandang strategis, tujuan Tiongkok untuk menurunkan intensitas karbon tidak hanya sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim global atau demi pengurangan emisi gas rumah kaca. Langkah Tiongkok juga merupakan kebutuhan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, keamanan energi, dan perlindungan lingkungan. Dalam langkah menuju tujuan tersebut, seperti yang telah dibahas dalam Bab 3 dan 4 bahwa Tiongkok telah bergerak cepat dalam lima tahun terakhir untuk mengurangi intensitas energinya dan meningkatkan penggunaan teknologi berbasis *clean energy*. Langkah Tiongkok dibuktikan dengan serangkaian paket kebijakan dan inovasi di bidang teknologi ramah lingkungan yang terus mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Xia, Li & Guomei, Zhou. *Thoughts and Policy Recommendations on Green Economy Development, dalam The Green Economy and its Implementation in China*. Singapore. Enrich Professional Publishing (S) Private Limited, 2011.

Jurnal

Andresen, S., & Agrawala, S., 2002. 'Leaders, pushers and laggards in the making of the climate regime'. *Global Environmental Change*, vol. 12, no.1, hal. 41–51.

Harris, Paul G. and Hongyuan Yu., 2005. Environmental Change and the Asia Pacific: China Responds to Global Warming', *Global Change, Peace and Security*, vol. 17, no. 1 hal. 23

Tangen, Heggelund and Buen., 2001. 'China's Climate Change Positions: At a Turning Point?'. *Energy & Environment*, vol. 12, no. 2&3, hal. 237-251

Wei, Zhudeng. et.al., 2014. 'Climate change and fiscal balance in Tiongkok over the past two millennia. *Research Paper*, vol. 24, no. 12

Zhang, Zhihong., 2003. 'The Forces behind China's Climate Change Policy: Interests, Sovereignty, Prestige' in Harris, P. G. (ed.) *Global Warming and East Asia: the Domestic and International Politics of Climate Change*. London and New York: Routledge, hal. 66-85

Jurnal, Artikel, dan PDF Online

Ash, R., Robin Porter, dan Tim Summers., 2012. *China, the EU and China's Twelfth Five-Year Programme, Europe China Research and Advice Network (ECRAN)* [online] Tersedia dalam:

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Asia/0312ecran_ashportersummers.pdf diakses pada : 20 Oktober 2018

BBC.co.uk, 2006. *Polusi ancam stabilitas Tiongkok*, [online] Tersedia dalam : http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/11/061113_Tiongkokcondition.shtml diakses pada : 14 Oktober 2018

Huang, Echo dan Tripti Lahiri., 2017. *Xi Jinping to China: 'Any Harm We Inflict on Nature Will Eventually Return to Haunt Us'*, [online] Tersedia dalam : <https://qz.com/1105119/watch-what-xi-jinpings-19th-chinese-communist-party-congress-work-report-said-on-climate-change/>. diakses pada : 11 Desember 2018/

- Jing, Li., 2015. *Nuclear Energy 'Essential' to Meet China's Climate Targets, Top Official Says*, [online] Tersedia dalam : www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1894099/nuclear-energy-essential-meet-chinas-climate-targets diakses pada : 28 November 2018
- Myllyvirta, Lauri. 2015. *How China Produced More Coal Than It Thought in 2013: And Why That Means It May Cut Emissions Faster*, [online] Tersedia dalam : <http://energydesk.greenpeace.org/2015/05/05/how-china-produced-more-coal-than-it-thought-in-2013-and-why-that-means-it-may-cut-emissions-faster> diakses pada : 28 September 2018
- Otterstrom, G. D. and Stripple, J., 2012. *Legitimacy in Global Adaptation Governance*. [online] Tersedia dalam : <http://www.earthsystemgovernance.org/lund2012/LC2012-paper197.pdf> diakses pada : 4 Oktober 2018
- Shankleman, Jess. 2017. *Xi at Davos Urges Trump to Stay in 'Hard Won' Paris Climate Deal*, [online] Tersedia dalam : <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-16/climate-experts-see-xi-touting-clean-energy-leadership-at-davos>. diakses pada : 11 Agustus 2018

Dokumen Resmi

- Kuriakose, Smita et.al., 2017. 'Accelerating Innovation in China's Solar, Wind and Energy Storage Sectors'. World Bank Group.